

PANGSA PASAR PER SEPTEMBER 2020 CAPAI 9,69%

Menkeu: Kinerja Keuangan Syariah Ungguli Konvensional

Oleh Nasori

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, industri keuangan syariah berkembang cukup mengesankan selama tiga dasawarsa terakhir, yaitu sejak berdirinya bank syariah pertama di Indonesia pada 1992. Bahkan, industri keuangan syariah tumbuh positif dan lebih tinggi dibandingkan keuangan konvensional meski ditekan pandemi Covid-19.

Hingga September 2020, total aset industri keuangan syariah nasional, tidak termasuk saham syariah, mencapai Rp 1.710,16 triliun. "Ini setara US\$ 114,64 miliar dengan *market share* (terhadap total aset industri keuangan nasional) sebesar 9,69%," ujar Sri Mulyani saat memberikan sambutan secara virtual pada acara Sharia Business and Academic Sinergy (SBAS) 2020, Selasa (29/12).

Acara yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) itu mengusung tema "Grand Strategy Pengembangan SDM Ekonomi Islam Berbasis Link and Match Solusi SDM Unggul, Indonesia Maju".

Aset keuangan syariah tersebut, papar Sri Mulyani yang juga merupakan ketua umum IAEI, meliputi aset perbankan syariah sebesar Rp 575,85 triliun, industri keuangan bukan bank syariah sebesar Rp 111,44 triliun, dan pasar modal syariah sebesar Rp

1.022,87 triliun.

Menurut dia, terjadi hal menarik selama kondisi pandemi Covid-19 yang sangat menekan perekonomian nasional. Pada saat intermediasi perbankan nasional cenderung turun, kinerja perbankan syariah justru stabil dan tumbuh lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional. "Ini sering terjadi di dalam suasana krisis seperti yang terjadi pada tahun 2008 yang lalu," ucap dia.

Di antara faktor yang menopang industri keuangan syariah tumbuh positif dan lebih tinggi itu, kata Sri Mulyani, karena Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar dan didukung kenaikan jumlah kelas menengah. "Itu memberikan dukungan terhadap pertumbuhan permintaan dari pelayanan keuangan syariah," kata dia.

Sri Mulyani mencatat, sampai September 2020, aset perbankan syariah

tumbuh 10,97%, lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional yang hanya 7,7%. Begitu juga dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan syariah tumbuh 11,56%, masih lebih tinggi dibandingkan konvensional yang mencapai 11,49%.

Sementara itu, dari sisi penyaluran pembiayaan, lanjut dia, juga tumbuh lebih tinggi mencapai 9,42% dibandingkan kredit perbankan konvensional yang mencapai 0,55%. Dari sisi rasio modal perbankan syariah mencapai 23,5% dan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) mencapai 3,31%.

"Kinerja bank syariah ini perlu menjadi salah satu jembatan dan modal awal bagi kita untuk terus mengembangkan sebuah ekosistem keuangan syariah yang berkualitas baik," kata dia.

Investor Saham

Sedangkan dari sisi pasar modal syariah nilai kapitalisasi saham, lanjut Sri Mulyani, secara umum menurun namun pertumbuhan jumlah investor saham syariah per tahun tumbuh 108%. "Dalam setahun terakhir sampai Juni 2020, investor saham syariah mengalami kenaikan 32% dibandingkan posisi sebelumnya pada 2019," imbuh dia.

Sementara itu, periode Januari-Juni 2020, transaksi saham syariah naik 26% mencapai 633 ribu transaksi dibandingkan periode sama 2019 mencapai 501 ribu transaksi. Sedangkan volume transaksi dalam semester I-2020 mencapai 6,2 miliar atau naik 57% dari periode sama 2019 yang mencapai 3,9 miliar.

Sri Mulyani menambahkan, po-



Jamkrindo Perluas Jangkauan Bantuan Bina Lingkungan

Penyuluh memberikan pelatihan hidroponik sebagai bentuk upaya pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Setelah sukses melakukan pemberdayaan secara berkelanjutan di Ciletuh Palabuhanratu Unesco Global Geopark, Jamkrindo melanjutkan pemberdayaan di wilayah Cikidang, salah satu kawasan ekonomi rakyat potensial di Kabupaten Sukabumi. Pemberdayaan masyarakat di wilayah Cikidang dimulai dengan pelaksanaan pelatihan budidaya hortikultura hidroponik bagi ibu-ibu PKK, sebagai salah satu respons untuk warga Cikidang di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi covid-19, juga pemberian bantuan sarana dan prasarana ibadah dan sekolah.

tensi keuangan syariah yang besar itu membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki karakter yang sesuai dengan prinsip keuangan sya-

riah dan sesuai dengan nilai universal Islam yakni keadilan, kejujuran, dan dapat dipercaya.

"Kualitas SDM juga bisa mening-

katkan pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan, inklusif dan bisa memenuhi harapan masyarakat dan sesuai nilai universal Islam," kata dia.

SDM Berkualitas Kunci Penguatan Keuangan dan Ekonomi Syariah

JAKARTA – Pemerintah akan menjadikan Indonesia sebagai produsen dan eksportir produk halal terbesar di dunia. Langkah strategis yang harus dilakukan untuk dapat mencapai target tersebut adalah memperkuat sumber daya manusia (SDM).

Wakil Presiden Ma'rif Amin mengatakan, dengan terciptanya SDM yang kuat dan unggul, maka akan mampu menghasilkan inovasi produk halal melalui riset *halal science* dalam bidang bahan dan material halal untuk industri maupun upaya relevan lainnya.

"Kita memang masih harus bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan SDM kita dalam bidang keuangan dan ekonomi syariah," tutur dia dalam acara Sharia Business & Academic Sinergy yang digelar secara virtual, Selasa (29/12).

Selain itu, ia mengatakan bahwa dalam melakukan riset, pemerintah tidak hanya berfokus pada pendeteksian material nonhalal sebagai penunjang proses sertifikasi. Pemerintah juga harus berfokus pada mencari substitusi dari material nonhalal yang saat ini banyak menyebabkan ketergantungan industri untuk menghasilkan produk yang berkualitas.

Sebagai contoh, untuk industri ko-



Ma'rif Amin

metik halal, Indonesia telah mampu mendominasi pasar nasional dengan inovasi kosmetik halal. Pemerintah ingin membuka peluang penguasaan pasar yang lebih luas lagi tidak hanya di tingkat nasional, namun juga pasar dunia.

Selain itu, ia berharap, beragam inovasi produk dengan material halal tersebut dapat dilakukan juga di industri suplemen makanan, bahan makanan dan minuman, herbal dan obat-obatan tradisional, produk *healthcare*, serta farmasi.

Dia mengatakan, Indonesia memi-

liki peluang besar untuk mengembangkan produk halal di kancah global, karena Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia dan pasar yang sangat besar bagi perdagangan produk halal dunia. "Indonesia merupakan konsumen produk halal terbesar dibandingkan dengan negara-negara mayoritas muslim lainnya," ujar dia.

Bahkan, Wapres menilai, permintaan produk halal oleh konsumen muslim global pun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan The State of Global Islamic Economy Report 2019/2020, besarnya pengeluaran konsumen muslim dunia untuk makanan dan minuman halal, pariwisata ramah muslim, *halal lifestyle*, serta farmasi halal diproyeksikan akan mencapai US\$ 3,2 triliun pada 2024.

"Dengan perkiraan penduduk muslim yang akan mencapai 2,2 miliar jiwa pada 2030, maka angka perekonomian pasar industri halal global ini akan terus meningkat dengan pesat. Kita harus dapat memanfaatkan potensi pasar halal dunia ini dengan meningkatkan ekspor kita yang saat ini masih sangat kecil dibandingkan dengan total pasar halal dunia," tegas dia. (try)

MENYUSUL KORUPSI BANSOS

Cakupan Audit Anggaran Penanganan Covid-19 Diperluas

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperluas cakupan sampel dalam mengaudit anggaran negara yang telah digelontorkan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN), seiring terungkapnya kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara. Dengan perluasan itu, penggunaan dana tersebut diharapkan bisa semakin transparansi dan akuntabel.

Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan, proses audit korupsi bansos sudah dalam tahap akhir dan jumlah sampel perusahaan rekanan penyaluran bansos Covid-19 yang diperiksa telah ditambah. "Ada beberapa perusahaan, termasuk tiga perusahaan (yang terlibat korupsi bansos), yang masuk dalam *sampling* pemeriksaan kita," ujar dia dalam Media Workshop BPK terkait Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2020 secara virtual, Selasa (29/12).

Kendati begitu, ia enggan menjelaskan lebih detail terkait hasil audit yang telah ditemukan di lapangan. Sebab, hingga saat ini para auditor negara masih terus menyelesaikan pemeriksaan dan membahasnya di internal BPK. Pihaknya berjanji akan memberikan informasi secara resmi hasil keseluruhan audit korupsi bansos kepada publik pada akhir Januari 2021.

Achsanul menjelaskan, proses pemeriksaan lebih fokus pada kualitas bansos serta perusahaan rekanan dan proses distribusinya. Pasalnya, proses pemilihan perusahaan rekanan dalam penyaluran bansos kali ini dilakukan tanpa melalui proses tender.

"Apakah kualitas bansos sesuai dengan yang dijanjikan dalam peraturan yang dikeluarkan Kemensos. Dan distribusinya ke mana saja, apakah

tepat sasaran atau tidak, termasuk pemilihan rekanan yang menjadi rekanan Kemensos, saat ini. Karena itu dilakukan dengan tanpa tender," ucap Achsanul.

Ia juga memastikan telah melakukan proses audit di luar korupsi bansos dengan melakukan pemeriksaan terkait anggaran penanganan Covid-19 lainnya. "Di Akhir Januari nanti BPK akan rilis, hasil pemeriksaan bansos. Tapi, ada juga pemeriksaan terkait (penanganan Covid-19) di area luar bansos yang terkait pemeriksaan kita," tandas dia.

Pada kesempatan yang sama, Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Bambang Pamungkas mengungkapkan, anggaran yang telah digelontorkan untuk menangani pandemi Covid-19 mencapai Rp 1.035 triliun yang sebagian besar berasal dari APBN.

"Selama pandemi Covid-19, BPK juga berperan serta secara aktif dalam mengawal perencanaan APBN dan pengelolaan dana penanganan Covid-19," ujar Bambang.

Ia merinci, dana penanganan Covid-19 itu berasal dari APBN mencapai Rp 937,4 triliun, APBD mencapai Rp 86,3 triliun, sektor moneter Rp 6,5 triliun, dan BUMN mencapai Rp 4 triliun. Kemudian, BUMD mencapai Rp 320 mi-

liar serta dana hibah dan masyarakat mencapai Rp 625,8 miliar.

Entitas pemeriksaan di tingkat pusat mencapai 39 dan daerah mencapai 202 entitas meliputi kementerian/lembaga, BUMN, BUMD dan pemda dengan melibatkan 241 tim pemeriksa.

Menurut dia, BPK melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 berbasis risiko atau *risk based comprehensive audit* melalui *audit universe* dan menggunakan *big data analytic*.

Jenis pemeriksaannya meliputi tiga bagian yakni keuangan dengan mencermati pergeseran anggaran dalam APBN dan APBD 2020 yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Kemudian pemeriksaan kinerja terhadap program atau kegiatan penanganan untuk menilai efektivitas program. (try)

PENGUMUMAN PENURUNAN MODAL PT TANGERANG LESTARI VISINDO

Direksi PT Tangerang Lestari Visindo, berkedudukan di Kabupaten Tangerang ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 Desember 2020, Para Pemegang Saham telah memutuskan:

Menyetujui pengurangan Modal Dasar Perseroan semula sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp112.000.000 (seratus dua belas juta Rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan semula sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp28.000.000 (dua puluh delapan juta Rupiah).

Bagi pihak-pihak yang berkeberatan atas keputusan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal pengumuman ini.

Kabupaten Tangerang, 30 Desember 2020

Direksi

PT TANGERANG LESTARI VISINDO



PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") dengan jadwal sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Januari 2021
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Kantor Pusat BRI
Jalan Jendral Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat

Rapat akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

- Perubahan Anggaran Dasar diantaranya dilakukan untuk memenuhi Pasal 57 dan Pasal 63 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), serta Pasal 28 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
- Perubahan Anggaran Dasar wajib ditetapkan oleh RUPS paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak diberlakukannya POJK No. 15/2020.

2. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN.

Penjelasan:

Sesuai Pasal 16 Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 ("Permen BUMN No.08/2019"), BUMN yang berbentuk Persero Terbuka memberlakukan peraturan ini melalui adopsi secara langsung oleh Direksi atau penguahan dalam RUPS.

3. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Penjelasan:

Sesuai Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 ("Permen BUMN No.11/2020"), BUMN yang berbentuk Persero memberlakukan peraturan ini melalui adopsi secara langsung oleh Direksi atau penguahan dalam RUPS.

4. Persetujuan atas Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham (Buyback) yang Disimpan sebagai Saham Treasuri (Treasury Stock).

Penjelasan:

Sesuai Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfungsinya Secara Signifikan, saham hasil pembelian saham kembali yang dialihkan tidak melalui penjualan di Bursa Efek Indonesia wajib memperoleh persetujuan RUPS.

5. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan didasarkan pada:

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang mengatur bahwa keputusan pemberhentian sementara Direksi dicabut atau dikuatkan melalui RUPS.
- Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang diadhi, serta dengan calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Perseroan tidak mengirinkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan ini dianggap sebagai pemanggilan resmi Rapat sesuai Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan.
- Berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek ("KSEI") pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 pukul 16.15 WIB.
- Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan merekomendasikan Pemegang Saham untuk hadir dengan memberikan kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting KSEI* ("eASY.KSEI") dengan prosedur sebagai berikut:
 - Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id.
 - Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web easy.ksei.co.id.
 - Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun mencabut kuasa, dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
 - Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan, easy.ksei.co.id, dan/atau situs web akses.ksei.co.id.
- Apabila Pemegang Saham tetap bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, ketentuan di bawah ini mohon dapat dipedomani:
 - Pemegang saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pemegang Saham menerbitkan Surat Kuasa dengan catatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan, dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT. Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 pukul 16.15 WIB.
 - Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya, serta Akta Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
 - Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh pada jam kerja di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di tempat Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
 - Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:
 - Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
 - Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
 - Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3° C.
 - Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - Pemegang Saham (atau kuasanya) yang tidak dapat memenuhi ketentuan huruf e di atas direkomendasikan memberikan kuasa melalui sistem eASY.KSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
- Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Perseroan:
 - Tidak menyediakan suvenir, makanan dan minuman;
 - Mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19.
- Bahan Mata Acara Rapat tersedia pada jam kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakan Rapat. Bahan Mata Acara dapat diunduh di situs web Perseroan atau diperoleh di Kantor Pusat Perseroan (Corporate Secretary Division, Gedung BRI 1 Lantai 15, Jalan Jendral Sudirman, Kav. 44-46, Jakarta Pusat 10210), jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham. Dikecualikan dari ketentuan ini, Bahan Mata Acara berupa perubahan pengurus Perseroan akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya penyelenggaraan, Pemegang Saham (atau kuasanya) dimohon hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 Desember 2020
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Direksi